

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan daerah, karena wilayah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten/kota serta daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilakukan haruslah mampu menyentuh dan dirasakan hingga masyarakat kecil. Pembangunan memiliki definisi yang luas yaitu suatu proses multi dimensi yang mencakup adanya perubahan-perubahan yang penting di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran dan penanganan kemiskinan (Todaro, 2000:10). Tujuan inti dari proses pembangunan adalah: meningkatnya ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kehidupan pokok, meningkatnya standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan perbaikan kualitas pendidikan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Arsyad, 2010:11).

Faktor tenaga kerja sebagai bagian dari sumber daya manusia (SDM) pada masa pembangunan nasional termasuk faktor yang teramat penting bagi keberhasilan terselenggaranya pembangunan nasional di Indonesia. Pemanfatan jumlah angkatan kerja tentu akan mampu mempercepat pembangunan dan pertumbuhan nasional. Secara tradisonal

pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh positif dalam memacu pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi.

Indonesia yang merupakan negara berkembang adalah merupakan satu dari banyak negara yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Masalah yang dimaksud adalah masalah mengenai tingginya jumlah pengangguran, dimana diketahui pengangguran merupakan masalah yang menghambat proses pembangunan. Masalah ketenagakerjaan adalah masalah yang sangat luas dan kompleks. Masalah pengangguran muncul sebagai imbas dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran yang jumlahnya bertambah terus menerus tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat (Hadi Sasana, 2009). Ketidak mampuan negara dalam mengurangi peningkatan angka pengangguran merupakan masalah yang cukup serius bagi pemerintah dan juga bagi masyarakat. Perumusan kebijakan yang dapat memberikan dorongan kepada perluasan lapangan kerja perlu dilakukan agar alat-alat dalam kebijakan ekonomi dapat secara efektif mengurangi pengangguran.

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai melalui dari seberapa jauh pemerintah mampu menciptakan dan menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi jumlah pengangguran, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang yang baru dan semakin bertambah akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada

sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan daya beli yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Paramitha Purwanti, 2009:1). Akan tetapi, perlu juga disadari kenyataan yang ada bahwa kesempatan kerja tidak selalu terjelma menjadi penyerapan tenaga kerja dan tenaga kerja yang terserap bisa memiliki pekerjaan lebih dari satu (Passay dan Taufik, 1990).

Secara umum, jumlah angkatan kerja di Jawa Timur sebanyak 20.150 juta pada akhir Agustus 2014. Jumlah angkatan kerja tidak mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun sejak 2012. Selanjutnya, jika dibandingkan jumlah angkatan kerja dan jumlah yang bekerja atau rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dijelaskan bahwa secara umum jumlah angkatan kerja yang terserap sebanyak 68,12 persen di bulan Agustus 2013. Nilai ini menurun sejak Februari 2012 yang mampu menyerap hingga 69,54 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan tingkat yang relatif stabil di level 4,19 persen, menunjukkan bahwa Jawa Timur relatif baik dalam mendorong angkatan kerja untuk bekerja, dan tidak menganggur.

Di Jawa Timur dalam rentang waktu 2012 hingga 2014 tingkat penyerapan tenaga kerja mengalami kenaikan. Keadaan ini selain merefleksikan karakteristik penggunaan modal (*capital intensive*) maupun tenaga kerja (*labour intensive*) di tiap sektornya, juga menggambarkan gairah pertumbuhan dan penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Di Triwulan I dan II tahun 2014, hampir seluruh sektor mengalami

penyerapan tenaga kerja yang negatif dengan rata-rata masing-masing adalah -2,94 dan -1,44. Beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan positif penyerapan tenaga kerja di atas 0,5 persen, antara lain: pengangkutan dan komunikasi serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. Selanjutnya di akhir tahun 2014 yaitu triwulan III dan IV, beberapa sektor usaha mengalami penyerapan tenaga kerja yang positif dengan rata-rata 5,03 persen. Beberapa sektor yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja, antara lain: pertanian, bangunan, pengangkutan dan komunikasi, serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Pada tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral di Jawa Timur. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013, dan kembali meningkat pada tahun 2014. Sektor PHR selama kuartal pertama tahun 2012, hingga kuartal keempat tahun 2014 menjadi sektor yang mengalami peningkatan terbesar sebanyak lima kali, yakni kuartal pertama hingga ketiga tahun 2012, kuartal keempat 2013, dan kuartal keempat tahun 2014. Sementara sektor industri pengolahan justru menjadi sektor yang cukup sering mengalami penurunan dalam jumlah paling besar, yakni pada kuartal keempat tahun 2012 hingga kuartal keempat tahun 2013, dan pada kuartal kedua hingga keempat tahun 2014. (BPS dan Bank Indonesia, 2015)

Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur dan mengkaji lebih dalam lagi tentang “Analisis Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB), Investasi, dan Tingkat Upah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Jawa Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Apakah Inflasi (Jawa Timur), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Jawa Timur), Investasi (Jawa Timur), dan Tingkat Upah (Jawa Timur), secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur ?
- b. Diantara variabel Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Tingkat Upah manakah yang berpengaruh paling dominan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah di kemukakan sebelumnya, maka perlu diketahui tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah variabel Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Tingkat Upah, secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

- b. Untuk mengetahui diantara variabel Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto, Investasi, dan Tingkat Upah, manakah yang paling dominan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, maka hasilnya diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut :

a. Bagi Pengembangan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi pihak universitas khususnya Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus sebagai koleksi pembendaharaan referensi dan tambahan wacana pengetahuan untuk perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau masukan terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur serta sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan penyerapan tenaga kerja.